



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2023-2024

SELASA, 16 JANUARI 2024

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR;**
- **Para Anggota DPR;**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.

Selamat Tahun Baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini, kita semua dirahmati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan.

Tahun 2024, merupakan tahun terakhir dari tugas konstitusional DPR RI Periode 2019-2024; menjadi komitmen kita semua untuk dapat menuntaskan tugas sebagai Anggota DPR RI yang akan meninggalkan *legacy* yang semakin baik dalam menjalankan kedaulatan rakyat;

sehingga dapat mempercepat terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang semakin sejahtera, tentram, adil, dan makmur.

Pada Tahun 2024 ini juga, akan berlangsung Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan melalui pemilu, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat juga memilih perwakilannya di DPR RI dan DPD RI;

Pemilu bukanlah hanya perebutan kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, akan tetapi adalah hak rakyat untuk dapat hidup lebih baik, lebih mudah, dan sejahtera.

Bagi rakyat, pemilu merupakan kesempatan bagi dirinya untuk dapat mengangkat harkat dan martabat

hidupnya; bagi rakyat, pemilu adalah jalan untuk memiliki hidup lebih nyaman dan lebih sejahtera;

Rakyat dalam menjalankan kedaulatannya menggunakan hak pilih, harus dijamin bahwa hak rakyat tersebut dilaksanakan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil; hak rakyat tersebut tidak boleh dihalang-halangi, ditekan, dimanipulasi, dan lain sebagainya.

Semua lembaga negara; legislatif, eksekutif, yudikatif; KPU, Bawaslu, TNI, POLRI, ASN, partai politik serta berbagai komponen bangsa lainnya, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil; kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada Masa Persidangan III ini, juga bertepatan dengan agenda Pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye; walaupun demikian Anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif, khususnya dalam merespons hal-hal yang sangat mendesak dan strategis.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 19 (*sembilan belas*) Rancangan Undang Undang yang pada saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, yang terdiri dari:

- 3 (*tiga*) RUU Usul DPR;
- 5 (*lima*) RUU Usul Pemerintah;
- 3 (*tiga*) RUU Usul DPD; dan
- 8 (*delapan*) RUU kumulatif terbuka.

Selain itu, terdapat 34 (*tiga puluh empat*) RUU yang akan memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I, yang terdiri dari:

- 3 (*tiga*) RUU Usul DPR;
- 2 (*dua*) RUU Usul Pemerintah; dan
- 29 (*dua puluh sembilan*) RUU Kumulatif Terbuka.

Kompleksitas dalam membentuk Undang-Undang sangat ditentukan oleh seberapa banyak perbedaan prespektif dan kepentingan antarpihak yang akan diatur dalam Undang-Undang tersebut.

DPR RI bersama Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang, selalu mencari titik temu yang mengutamakan kepentingan negara dan juga memperhatikan aspirasi publik.

Sidang Dewan yang Terhormat,

APBN Tahun 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi dan berperan sebagai *shock absorber*, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global, khususnya stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi.

APBN menuntaskan agenda pembangunan yang fokus dalam *human capital*, *physical capital*, *natural capital*, dan *institutional reform*.

APBN juga menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat dalam hal penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting*, dan mengatasi kesenjangan.

DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2024 agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyejahterakan rakyat.

Pemerintah harus tertib dan disiplin dalam menjalankan APBN Tahun 2024; penggunaan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.

Pemerintah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dan tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran, merealisasikan anggaran secepatnya, serta menyiapkan antisipasi ketidakpastian.

Penyesuaian program dan alokasi anggaran dalam APBN Tahun 2024 yang sedang berjalan, harus sesuai dengan mekanisme, syarat, dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang APBN Tahun 2024;

Bagaimanapun APBN adalah Uang Rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan pada Masa Persidangan III, akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan, serta hal-hal yang menjadi perhatian luas dari rakyat.

DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait akan memastikan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis dan yang dapat menjamin hak rakyat menjalankan kedaulatannya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarparlemen, pada masa persidangan ini, DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, serta *Parliamentary Union of the OIC (PUIC)*.

DPR RI juga akan mengundang parlemen dari negara-negara sahabat untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut, akan meningkatkan kerja sama antarnegara dalam menyikapi

berbagai masalah global serta memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada Masa Persidangan III dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR RI.

Rencana kerja secara umum DPR RI ini, agar dapat menjadi informasi bagi rakyat Indonesia, sehingga dapat ikut berpartisipasi bagi DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024. Atas nama Pimpinan DPR, kami menyampaikan "SELAMAT BEKERJA MENJALANKAN KEDAULATAN RAKYAT"

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

➤ Daftar RUU yang masih berada dalam Pembahasan Tingkat I:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan;
2. RUU tentang Desain Industri;
3. RUU tentang Bahasa Daerah;
4. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
6. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
9. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
10. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No, 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
14. RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*;
15. RUU tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*;
16. RUU tentang Pengesahan *Accord entre le Gouvernement de la Republique D'Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relatif a la Cooperation dans le Domaine de la Defence*;
17. RUU tentang Pengesahan *Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*;
18. RUU tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the*

*Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Concerning Cooperation in the Field of Defence;*
dan

19. *RUU tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters.*

➤ **Daftar RUU yang Akan Memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I**

A. RUU Usul DPR

1. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga;
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

B. RUU Kumulatif Terbuka

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
2. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
3. 27 (*dua puluh tujuh*) RUU Kabupaten/Kota.